

## Koperasi dan Pemerataan Pembangunan

RPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Ditulis oleh: Dewi Meisari Haryanti

**P**erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Demikian kutipan sebuah ayat dari konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Walaupun sudah dihapus dari bagian penjelasan, masih cukup banyak pihak meyakini bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan spirit dan makna dari ayat tersebut adalah Koperasi. Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan tren peningkatan ketimpangan dan perlambatan penurunan tingkat kemiskinan, memicu pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan perekonomian yang dipandang sudah tidak sejalan dengan amanah konstitusi tersebut. Hal ini karena perekonomian tidak disusun sebagai suatu usaha bersama, melainkan lebih banyak sebagai usaha milik orang-perseorangan. Kondisi ini tercermin dari angka kontribusi dari sekitar 80,000 koperasi aktif terhadap Pendapatan Domestik Bruto yang hanya sekitar 1.9% (2014).

Tingkat kontribusi koperasi Indonesia di atas jauh lebih rendah dari gambaran di beberapa negara maju seperti Perancis, yang tingkat produksi atau omzet dari 48 koperasi terbesarnya saja sudah mencatatkan kontribusi sekitar 16.2% dari PDB; Denmark yang 4 koperasi terbesarnya menyumbang sekitar 8.2% dari PDB; Jerman yang 26 koperasi terbesarnya memberi kontribusisekitar 6.07%; atau Swedia yang 5 koperasi terbesarnya menyumbang sekitar 3.3% dari PDB<sup>1</sup>. Kontribusi koperasi yang relatif kecil terhadap PDB menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan besar di Indonesia bukanlah berbentuk koperasi, yang artinya, dimiliki oleh beberapa orang saja, sehingga terdapat pemusatan distribusi pendapatan pada sekelompok orang tersebut. Sementara di 4 negara diatas, perusahaan-perusahaan besar ada yang berbentuk koperasi yang dimiliki oleh masyarakat banyak, sehingga distribusi pendapat lebih tersebar ke banyak anggota masyarakat. Secara kasat mata, seakan terdapat indikasi bahwa negara-negara yang koperasinya maju cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Secara berurutan, angka koefisien gini Indonesia tergolong tinggi, yaitu 0.41 (2014), sementara Perancis 0.33, Denmark 0.29, Swedia 0.27, dan Jerman 0.3<sup>2</sup>.

### Ketimpangan dapat Mengancam Keberlanjutan Pembangunan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan indikasi bahwa sejalan dengan semakin tingginya tingkat ketimpangan, tensi sosial juga meningkat. Lingkungan dengan tensi sosial yang tinggi secara umum memiliki tingkat kerawanan konflik, tindakan kriminal, atau bahkan pembunuhan lebih tinggi (*The Equality Trust Research Digest*, 2011). Situasi ini pada akhirnya akan menurunkan keramahan lingkungan bagi dunia usaha, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan lainnya.

<sup>1</sup> Data omzet koperasi di beberapa negara di dapat dari World Cooperative Monitor 2011 (<http://www.thenews.coop/49090/news/general/view-top-300-co-operatives-around-world/>, diakses pada 25 Juli 2016); sementara data PDB dari Bank Dunia (posisi data tahun 2011); diolah.

<sup>2</sup> Sumber data untuk Indonesia adalah BPS, sementara untuk data koefisien gini negara lainnya bersumber dari Bank Dunia, posisi tahun 2011.

Research & Policy Insight (RPI) adalah analisa kebijakan oleh dosen/peneliti FEB UI berbasis keilmuan & penelitian sebagai kontribusi & dharma bakti FEB UI pada Indonesia

Riset Pengabdian kepada Masyarakat  
Gedung Dekanat FEB UI Lt.3

Humas Media Center FEB UI,  
Gedung Dekanat FEB UI Lt.3  
Kampus UI Depok 16424  
ph. +62 21 727 2425 ext.126,112;  
Fax. +62 21 788 90 454  
email; [mediacenterfeui@gmail.com](mailto:mediacenterfeui@gmail.com);  
website: <http://www.feb.ui.ac.id>

Tidak hanya itu, ketimpangan juga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena ketika pertumbuhan terjadi di suatu konteks perekonomian yang tidak inklusif atau timpang, maka hasil pertumbuhan ekonomi cenderung hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi dengan tingkat pendapatan teratas saja (PBB, 2013). Selanjutnya, jika tidak ada langkah afirmatif untuk redistribusi pendapatan dari kalangan teratas ke kalangan terbawah, pertumbuhan ekonomi beresiko memperburuk ketimpangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan tensi sosial, sehingga sampai pada titik tertentu dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu sendiri.

Besarnya potensi dampak negatif yang dapat disebabkan oleh ketimpangan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tema ketimpangan dalam *Report on World Social Situation* pada tahun 2013; dan pada 2015, mengurangi ketimpangan menjadi target pembangunan ke-10 di dalam *Sustainable Development Goals* (SDG). Hal ini menegaskan bahwa pergeseran paradigma dalam pembangunan tengah terjadi. Jika dulu perhatian terpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, kini perhatian bergeser pada kualitas pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait dengan proses pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang menyertainya. Adapun pergeseran ini merupakan respon atas perkembangan dunia itu sendiri, di mana pengurangan kemiskinan mengalami perlambatan, yang ditengarai terjadi karena ketimpangan yang kian melebar. Mengutip data dari *Global Wealth Report (2013)*, sekitar 0.7% penduduk dunia dengan kekayaan di atas USD 1 juta menguasai 41% dari kekayaan global. Sementara sekitar 69% penduduk dunia dengan kekayaan kurang dari USD 10,000 hanya menguasai 3% dari kekayaan global. Dengan asumsi penduduk dunia sekitar 6 milyar jiwa, maka sekitar 42 juta orang beraset tertinggi dunia menguasai 41% kekayaan global, sementara sekitar 4.14 milyar orang yang beraset rendah hanya menguasai 3%. Potret ketimpangan dunia yang semakin memprihatinkan ini membuat pergeseran perhatian menjadi suatu keniscayaan. Terlebih karena tingginya ketimpangan bukan hanya menyiratkan terjadinya pemusatan kekayaan ke segelintir kelompok tertentu, melainkan juga mengindikasikan adanya pemusatan kekuasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, ketimpangan juga dapat menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan suatu proses pembangunan yang inklusif.

## Dapatkah Koperasi menjadi Solusi untuk Mengurangi Ketimpangan?

Jika mengamati perkembangan koperasi di dunia, koperasi tampak bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan. Secara makro, indikasi awal terlihat dari cenderung rendahnya tingkat ketimpangan di negara-negara di mana koperasi memiliki kontribusi besar bagi perekonomian. Sementara secara mikro, badan usaha koperasi yang sukses di dunia menunjukkan perbedaan mendasar terkait tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tingkat ketimpangan yang terjadi di organisasi tersebut. Hal ini terlihat dari contoh kasus klub sepakbola FC Barcelona dan sebuah konglomerasi berbasis koperasi bernama Mondragon Cooperative Corporation, yang keduanya beroperasi di Spanyol<sup>3</sup>.

Dari kasus FC Barcelona - dimiliki oleh lebih dari 140,000 anggota yang juga merupakan penggemar yang aktif menonton dan membeli tiket pertandingan di stadion milik FC Barcelona - dapat ditarik pelajaran bahwa proses demokrasi yang membuka kesempatan bagi semua anggota untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan arah perkembangan perusahaan dapat diejawantahkan melalui pemilihan presiden club setiap 4 tahunnya (*one man one vote*). Mekanisme ini ternyata memiliki dampak terhadap tingkat harga tiket yang ditetapkan oleh klub.

Sebagai klub sepakbola ternama dunia, FC Barcelona memiliki tingkat bonafiditas yang setara bahkan lebih tinggi daripada klub Arsenal di Inggris yang dimiliki oleh 4 orang pemilik saham terbesar. Dengan demikian, FC Barcelona dapat saja menetapkan harga tiket yang mahal. Namun hal tersebut tidak terjadi karena tiket termahal di FC Barcelona (sekitar Rp10.5 juta) masih jauh lebih murah daripada tiket termurah di Arsenal (sekitar Rp16 juta). Hal ini tentu dapat terjadi karena orientasi FC Barcelona sebagai perusahaan dengan sistem pengelolaan (*governance*) koperasi bukanlah *profit-oriented* melainkan *benefit-oriented*, dimana fokus perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika harga tiket FC Barcelona ditetapkan oleh motif maksimisasi laba, tentu harga yang ditetapkan bisa saja lebih tinggi daripada harga tiket di Arsenal, dan tetap saja laku, namun bisa jadi yang lebih banyak membeli adalah dari kalangan non-anggota, khususnya dari kalangan yang memiliki daya beli tinggi. Tidak hanya ke harga tiket, sentuhan koperasi juga terlihat dari kepedulian sosial klub yang berkomitmen untuk menjadi sponsor UNICEF.

<sup>3</sup> Contoh kasus yang dibahas dalam artikel ini bersumber dari Riddley and Bull (2011).

Hal-hal ini seakan memperkuat citra FC Barcelona yang mengusung aktif mempromosikan diri dengan moto *more than a club*. mentara dari kasus *Mondragon Cooperative Corporation (MCC)*, sebagai konglomerasi yang dimiliki oleh para pekerja (semua karyawan di MCC dan anak-anak perusahaannya adalah pemilik perusahaan), dapat ditarik pelajaran bahwa proses demokrasi di dalam perusahaan yang membuka kesempatan bagi semua karyawan untuk ikut aktif menentukan arah perkembangan perusahaan, memiliki dampak dalam tingkat ketimpangan kesejahteraan di dalam perusahaan. Rasio gaji tertinggi dibanding terendah di MCC adalah 9:1. Angka ini sangat jauh lebih merata jika dibandingkan dengan Multinational Corporation di Amerika Serikat, yang pada umumnya rasio gaji tertinggi dan terendahnya bisa mencapai 419:1. Karakteristik kepemilikan yang bersifat kolektif dan tidak adanya pemusatan kepemilikan di suatu pihak tertentu membuat grup Mondragon juga dipandang sebagai contoh nyata dari bentuk suatu konglomerasi sosial.

Di Indonesia sendiri, bentuk konglomerasi sosial seperti Mondragon sudah mulai dibangun oleh Keling Kumang Grup, yaitu sebuah *holding* berbasis koperasi di Kalimantan Barat. Berawal dari sebuah *Credit Union* atau Koperasi Kredit Keling Kumang (CUKK) yang berdiri pada 1993, kini CU tersebut telah memiliki anggota lebih dari 160,000 orang dengan total aset sekitar Rp 1.2 trilyun. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan, cakupan kebutuhan anggota CUKK juga berkembang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru anggotanya, CUKK mengembangkan *sister company* yang bergerak di bidang retail (toserba modern bernama K-52 Mart), dealer sepeda motor, lembaga kursus Bahasa Inggris, sampai perusahaan jasa yang memberikan jasa pengurusan pemakaman. Usaha-usaha multi-sektor inilah yang dikelola di bawah payung Keling Kumang Grup.

Contoh-contoh kasus di atas, baik di konteks global maupun nasional, menunjukkan bahwa perusahaan berbentuk koperasi memiliki karakteristik kepemilikan dan kekuasaan yang lebih merata. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan juga tidak dinikmati oleh segelintir orang saja, melainkan tersebar dengan lebih merata ke seluruh anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi adalah kendaraan potensial untuk melaksanakan pembangunan ekonomi inklusif yang disertai dengan pengurangan ketimpangan. Namun demikian mewujudkan potensi menjadi realisasi bukanlah hal yang mudah. Walaupun contoh-contoh sukses sudah cukup banyak, tantangan besar dalam proses replikasi tampak masih menghangat, sehingga sampai saat ini

koperasi masih belum menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Mengapa koperasi tidak berkembang di Indonesia? Apa langkah aksi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan dan mengarusutamakan koperasi demi mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif? Pertanyaan-pertanyaan ini memang klasik, namun jelas masih membutuhkan jawaban konkrit yang dapat diimplementasikan.

### **Pendidikan Perkoperasian sebagai Kunci**

Dalam sesi seminar dan diskusi bertema “*Cooperative for Sustainable Future*” yang diselenggarakan oleh RPM FEB UI pada bulan Juli lalu, tersusun kesimpulan bahwa sebagai perusahaan, pengembangan koperasi tak dapat dilepaskan dari pembangunan dua pilar utama organisasi, yaitu: *human and system*. Pilar *human* atau sumber daya manusia adalah yang lebih utama, karena melalui pencetakan SDM yang handal, sistem yang baik dapat dilahirkan. Namun jika suatu sistem yang sudah terbukti handal di banyak perusahaan, juga akan gagal jika dilaksanakan oleh SDM yang tidak mumpuni. Oleh karena itu, untuk menghasilkan SDM yang handal, pendidikan perkoperasian adalah kunci utamanya, sehingga harus segera disusun kurikulumnya secara sistemik; tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, melainkan dari pendidikan dasar atau menengah. Saat ini pendidikan perkoperasian berjalan sporadis dan belum sistemik. Tidak semua perguruan tinggi memiliki mata kuliah Koperasi atau perkoperasian; dan di perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah koperasi pun umumnya tidak tersedia bagi seluruh fakultas, melainkan hanya di fakultas ekonomi saja. Di FEB UI sendiri, ada mata kuliah Koperasi namun hanya 2 SKS.

Adapun pendidikan perkoperasian perlu disusun secara sistemik tidak hanya dalam rangka menciptakan SDM handal untuk mengembangkan dan mengelola koperasi, namun juga meningkatkan pemahaman para petugas pembina dan pengawas koperasi itu sendiri. Hasil pengamatan praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak petugas pembina dan pengawas koperasi - baik di tingkat daerah maupun nasional - yang dipandang belum memiliki pemahaman baik dan benar atas konsep koperasi dan perkoperasian, sehingga proses pembinaan atau pengawasan yang dijalankan belum efektif dalam meningkatkan kinerja koperasi di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar pemerintah - melalui Kementerian Koperasi dan UKM - segera menginisiasi penyusunan kurikulum pendidikan perkoperasian dengan

berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Selain, Kementerian Koperasi dan UKM perlu meningkatkan jumlah, cakupan, dan kualitas program *capacity building* bagi pengurus koperasi, agar dapat dirancang dengan terstruktur dan memiliki jenjang kompetensi yang jelas. Selain itu, direkomendasikan pula agar penyaluran program dukungan permodalan atau Sistem Informasi Manajemen dapat diprioritaskan bagi koperasi yang pengurusnya sudah mengikuti serangkaian program *capacity building* pemerintah, atau sudah memiliki sertifikat kompetensi lain yang setara.

Tanpa SDM yang kompeten, sistem yang mahal atau teruji efektif di banyak tempat dapat saja gagal meningkatkan kinerja koperasi. Tanpa SDM yang kompeten pula, dukungan permodalan tidak akan efektif dalam meningkatkan usaha koperasi. Sudah saatnya pemerintah meletakkan fokus program pada pembangunan modal manusia. Oleh karena itu, pendidikan perkoperasian adalah kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan klasik di atas. Bukan sistem, bukan dukungan permodalan, apalagi dana hibah yang seringkali kontraproduktif dalam membangun semangat kemandirian koperasi di Indonesia.